

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan otonomi daerah, salah satu syarat yang diperlukan adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan, sumber pembiayaan tersebut disamping sumber dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan juga sumber dari dalam sendiri yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, dapat dikatakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah ini tercermin dari tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai, PAD menjadi proporsi yang dominan dalam menyumbang total pendapatan daerah maka tingkat kemandirian daerah dapat tercapai.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dilaksanakannya otonomi daerah yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 sampai tahun 2005, total PAD selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 dan 2002, proporsi PAD terhadap total

pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dana perimbangan. Namun, pada tahun 2003-2005, proporsi PAD lebih tinggi dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu juga menunjukkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai analisis tingkat kemandirian pada pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta pihak-pihak yang lain.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan menganalisis tingkat kemandirian melalui rasio desentralisasi fiskal, besarnya bantuan Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat melalui rasio Dana Alokasi Umum maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 masih "rendah". Hal ini menunjukkan pola hubungan yang konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Besarnya tingkat kemandirian masing-masing sebesar 32,82%; 36,39% dan 38,53%. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mengakibatkan kenaikan peringkat yaitu menjadi "sedang". Besarnya tingkat kemandirian

adalah sebesar 53,81% dan 57,20%. Hal ini menunjukkan pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah partisipatif artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi.

2. Besarnya Rasio Dana Alokasi Umum selama periode tahun 2001-2005 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Besarnya Rasio Dana Alokasi Umum berkisar antara 26,44% sampai dengan 45,67%. Hal ini menunjukkan besarnya Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kategori “cukup” pada tahun 2001. Kategori “sedang” pada tahun 2003 dan 2005. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2004 pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kategori “kurang” terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan Dana Alokasi Umum terhadap APBD pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2001-2005 peranannya masih besar. Akan tetapi, peranan PAD terhadap total pendapatan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah maka tingkat kemandirian pemerintah semakin baik. Begitu juga dengan DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, semakin kecil DAU yang diterima maka peranan pemerintah semakin kecil dalam mendukung dana untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berusaha untuk

meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah yang ada serta memanfaatkannya dengan efektif dan efisien.

Namun, dalam meningkatkan PAD pemerintah daerah mengalami kendala yaitu masyarakat merasa keberatan dengan adanya pajak atau retribusi baru dan enggan untuk membayar pajak. Padahal hal tersebut merupakan komponen utama untuk meningkatkan PAD. Hal ini ditambah dengan potensi SDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kurang.

B. Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Pemerintah daerah hendaknya melakukan rencana strategis yang sifatnya jangka panjang misalnya dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai di obyek wisata pantai karena Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan pantai yang indah. Dengan hal ini dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan diharapkan warga sekitar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya yaitu dengan mendirikan toko ataupun rumah makan disekitarnya. Sedangkan untuk rencana jangka pendek adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat akan pentingnya membayar pajak, karena tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Namun hal ini harus diiringi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan

memberikan *reward* kepada wajib pajak patuh sehingga masyarakat segan untuk membayar pajak. Pada akhirnya PAD dapat mencukupi semua kebutuhan belanja daerah dan dapat mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri dalam berotonomi.

2. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan menarik investor untuk berinvestasi. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting. Oleh karena itu, terutama dalam pengembangan investasi haruslah diperhatikan. Pemerintah dapat memfasilitasi pengusaha/ investasi dengan berbagai sarana dan prasarana yang selalu ditingkatkan, serta melakukan promosi daerah dengan membantu memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan pengusaha, serta membuka kerja sama yang dilakukan dengan transparan. Pemerintah daerah juga harus bersikap *business friendly* dengan para pengusaha atau dengan memberikan kemudahan dalam ijin usaha. Hal ini akan memudahkan bagi para investor untuk melakukan investasi.

REFERENSI

- Astuti, Sri dan Lita Yulita. April 2003. "*Implementasi Otonomi Daerah dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*". Buletin Ekonomi Vol. 1. No. 1: hal. 17-25.
- Astuti, ES dan Joko Tri Haryanto. Desember 2005. "*Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Propinsi*". Usahawan No.12 TH XXXIV.
- Bastian, Indra. 2006. "*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*". Erlangga: Jakarta.
- Costa, Matheus ABH da. 2002. "*Tingkat Kemandirian Kota Kupang Ditinjau dari Aspek Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah 1997/1998-2001*". Tesis. Magister Ekonomi Pembangunan UGM.
- Dewi, Elita. Maret 2003. "*Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*". Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 7. No.1: hal 81-85.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. "*Otonomi dan Pembangunan Daerah*". Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*". Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. "*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*". UPP AMP YKP: Yogyakarta.
- Hariadi. 2002. "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro*". Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 5 No. 1.
- Hariyandi, Sony Y. dan Tengku Agus I. 2005. "*Penganggaran Sektor Publik*". Bayu Media Publishing: Malang.

Hidayat, Syarif. 2000. "*Dilema Otonomi Daerah Perluasan Wewenang Daerah vs. Wewenang Elite Daerah*". Analisa CSIS, Tahun XXIX/2000. No. 1: Hal. 76-86.

Kifliansyah. 2004. "*Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*". Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Abdul Halim. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Mahi, Raksaka. Desember 2005. "*Manajemen Keuangan Daerah di Era Otonomi*". Usahawan No.12 TH XXXIV.

Mardiasmo. 2002. "*Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*". Andi: Yogyakarta.

Muhtadi. 1 April 2006. "*Ketika Semangat Desentralisasi Tidak Kompak*". Kompas.

Nogi, Hessel. 2005. "*Manajemen Publik*". Grasindo: Jakarta.

✓ Silva, Petrus. 2004. "*Analisa Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2001*". Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Abdul Halim. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Solihin, Dadang dan Deddy Supriady B. 2004. "*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*". Pt. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Syaukani. April 2003. "*Upaya Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian dalam Otonomi Daerah*". Usahawan No.04 TH XXXII.

Wendyartaka, Anung. 12 Maret 2001. "*Otonomi Akan Mempertajam Kesenjangan*". Kompas.

_____, 14 September 2006. "*Laporan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode 2001-2006*". Kedaulatan Rakyat.

_____, 16 September 2006. "Ringkasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Magelang Tahun 2005". Kedaulatan Rakyat.

_____, 2005. Laporan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta 2005. Bank Indonesia Yogyakarta.

_____, 2001. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005.

_____, 2004. "Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka". Tahun anggaran 2002-2004. Badan Pusat Statistik Yogyakarta.

_____, 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah". Citra Umbara: Bandung.

_____, 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Citra Umbara: Bandung.